



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG**

**NOMOR : 140/174/Pem-CBY/XII/2021**

**TENTANG**

**EVALUASI PERATURAN NAGARI PASAR BARU  
KECAMATAN BAYANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT BAYANG,**

- Mem baca : Surat Wali Nagari No. 141/ 118 /WN-PB/BY/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa evaluasi terhadap Perubahan APB Nagari yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APB-P) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan

Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 104 Tahun 2021, Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .....Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .....Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Hasil Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantunm dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **PASAR BARU**.

KETIGA : Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Pasar Baru  
Pada tanggal: 27 Desember 2021

**CAMAT BAYANG,**  
  
**DENY SURYANTI, S.STP.MSc**  
NIP. 19771207 199612 2 001

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

**HASIL EVALUASI  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APBNag.)  
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO                | URAIAN BELANJA   | EVALUASI AWAL<br>Rp.    | EVALUASI AKHIR<br>Rp.   | SUMBER DANA |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1                 | 2  | 3                       | 4                       | 5           |
| <b>PENDAPATAN</b> |  | <b>1.401.827.608,00</b> | <b>1.401.827.608,00</b> |             |
| <b>A.</b>         | <b>Pendapatan Asli Nagari</b>                              |                         |                         |             |
|                   | 1. Hasil Usaha   | -                       | -                       |             |
|                   | 2. Hasil Aset  | -                       | -                       |             |
|                   | 3. Hasil Gotong Royong Masyarakat                          | 12.000.000,00           | 12.000.000,00           |             |
|                   | 4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah                    | -                       | -                       |             |
| <b>B.</b>         | <b>Pendapatan Tranfer</b>                                  | <b>1.389.827.608,00</b> | <b>1.389.827.608,00</b> |             |
|                   | 1. Dana Desa/Nagari  | 915.990.000,00          | 915.990.000,00          |             |
|                   | 2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah | 14.788.800,00           | 14.788.800,00           |             |
|                   | 3. Bagi Hasil Retribusi Daerah                             | 2.673.900,00            | 2.673.900,00            |             |
|                   | 4. Pengembalian PBB-P2                                     | 6.453.308,00            | 6.453.308,00            |             |
|                   | 5. Alokasi Dana Desa/Nagari                                | 449.921.600,00          | 449.921.600,00          |             |
| <b>C.</b>         | <b>Pendapatan Lain-Lain</b>                                |                         |                         |             |
|                   | 1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga                            | -                       | -                       |             |
|                   | 2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah                    | -                       | -                       |             |
| <b>BELANJA</b>    |  |                         |                         |             |
| <b>A</b>          | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI</b>            | <b>499.349.902,61</b>   | <b>499.347.902,61</b>   |             |
|                   | <b>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>                  | <b>425.400.000,00</b>   | <b>425.400.000,00</b>   |             |
|                   | a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari             | 51.600.000,00           | 51.600.000,00           | ADD         |
|                   | b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari        | 310.500.000,00          | 310.500.000,00          | ADD         |
|                   | c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari                       | 54.000.000,00           | 54.000.000,00           | ADD         |
|                   | d. Honorarium Office Boy (OB)                              | 9.300.000,00            | 9.300.000,00            | PAN         |
|                   | <b>2. Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan</b>    | <b>4.179.627,00</b>     | <b>4.179.627,00</b>     | PBH         |
|                   | <b>3. Operasional Perkantoran</b>                          | <b>25.581.275,61</b>    | <b>25.581.275,61</b>    | ADD/PBH/PAN |
|                   | <b>4. Operasional EAMUS Nagari</b>                         | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.000.000,00</b>    | ADD         |
|                   | <b>5. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Wali Nagari</b>    | <b>12.037.000,00</b>    | <b>12.037.000,00</b>    | PBH         |
|                   | <b>6. Pendataan dan Penyusunan Profil dan SDGs Nagari</b>  | <b>8.325.000,00</b>     | <b>8.325.000,00</b>     | DD          |
|                   | <b>7. Penyelenggaraan Musrenbang dan RKP Nagari</b>        | <b>7.827.000,00</b>     | <b>7.827.000,00</b>     | DD          |
|                   | <b>8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari</b>            | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>     | DD          |
|                   | <b>9. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari</b>               | <b>2.000.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>     | DD          |
|                   | <b>10. Insentif Pemungutan PBB</b>                         | <b>2.500.000,00</b>     | <b>2.500.000,00</b>     | PBH         |
| <b>B</b>          | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</b>               | <b>232.430.000,00</b>   | <b>232.430.000,00</b>   |             |
|                   | <b>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   | <b>151.360.000,00</b>   | <b>151.360.000,00</b>   |             |
|                   | 1. Honorarium Guru TK/PAUD                                 | 80.500.000,00           | 80.500.000,00           | DD          |
|                   | 2. Honorarium Guru TPQ/MDTA                                | 54.000.000,00           | 54.000.000,00           | DD          |
|                   | 3. Honorarium PKPKN dan PPKN                               | 16.860.000,00           | 16.860.000,00           | DD          |
|                   | <b>BIDANG KESEHATAN</b>                                    | <b>81.070.000,00</b>    | <b>81.070.000,00</b>    |             |
|                   | 1. Insentif Kader Yandu dan PMT                            | 58.800.000,00           | 58.800.000,00           | DD          |
|                   | 2. Pergantian Transport PPKBD dan Sub PPKBD                | 4.440.000,00            | 4.440.000,00            | DD          |
|                   | 3. Pergantian Transport Kader KPM dan Nagari Siaga         | 2.400.000,00            | 2.400.000,00            | DD          |
|                   | 4. Pergantian Transport Bidan Desa                         | 12.000.000,00           | 12.000.000,00           | DD          |
|                   | 6. Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)                      | 3.430.000,00            | 3.430.000,00            | DD          |
| <b>C</b>          | <b>BIDANGAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI</b>            | <b>48.601.663,00</b>    | <b>48.601.663,00</b>    |             |
|                   | 1. Kegiatan MTQ Nagari dan Kabupaten                       | 11.500.000,00           | 11.500.000,00           | DD          |
|                   | 2. Kegiatan PHBN   | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | DD          |
|                   | 3. Kegiatan Pemuda, Olah Raga dan Liga Desa                | 11.000.000,00           | 11.000.000,00           | DD          |
|                   | 4. Operasional Lembaga Adat                                | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | DD          |
|                   | 5. Operasional LPMN  | 6.601.663,00            | 6.601.663,00            | DD          |
|                   | 6. Kegiatan PKN Nagari                                     | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | DD          |

|                                   |   |                       |                       |           |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>D</b>                          | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI</b>                | <b>173.200.000,00</b> | <b>161.200.000,00</b> |           |
|                                   | 1. Pembangunan Keramba/Kolam Darat Milik Nagari             | 68.190.000,00         | 64.920.000,00         | DD        |
|                                   | 2. Pembangunan Penguatan Ketahanan Pangan Nagari            | 100.010.000,00        | 91.280.000,00         | DD        |
|                                   | 3. Bimtek dan Study Banding Kelompok Petani                 | 7.500.000,00          | 17.000.000,00         | DD        |
|                                   | 4. Bimtek dan Study Banding Kelompok Perikanan              | 7.500.000,00          | 10.000.000,00         | DD        |
|                                   | 3. Bimtek Prakerja Wali Nagari                              | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | DD        |
| <b>E</b>                          | <b>BIDANG PENANG. BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI</b>  | <b>440.700.000,00</b> | <b>440.700.000,00</b> | <b>DD</b> |
|                                   | 1. Penanganan Covid-19                                      | 73.500.000,00         | 73.500.000,00         | DD        |
|                                   | 4. BLT (Bantuan Langsung Tunai) Nagari                      | 367.200.000,00        | 367.200.000,00        | DD        |
| <b>PEMBIAYAAN I</b>               |   |                       |                       |           |
|                                   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)                     | 7.420.716,61          | 7.420.716,61          |           |
| <b>PEMBIAYAAN II</b>              |   |                       |                       |           |
| <b>APBNag SUDAH BISA DISAHKAN</b> |   |                       |                       |           |
| <b>A</b>                          | <b>PENJELASAN</b>   |                       |                       |           |
|                                   | Pendapatan Alokasi Dana Desa                                |                       |                       |           |
|                                   | 1. Pendapatan Asli Nagari (PAN)                             | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         |           |
|                                   | 2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah  | 14.788.800,00         | 14.788.800,00         |           |
|                                   | 3. Bagi Hasil Retribusi Daerah                              | 2.673.900,00          | 2.673.900,00          |           |
|                                   | 4. Pengembalian PBB-P2                                      | 6.453.308,00          | 6.453.308,00          |           |
|                                   | 5. Alokasi Dana Desa/Nagari                                 | 449.921.600,00        | 449.921.600,00        |           |
|                                   | <b>TOTAL ADD, PBH DAN PAN</b>                               |                       | <b>485.837.608,00</b> |           |
| <b>B</b>                          | <b>Belanja ADD, PBH dan PAN</b>                             |                       | <b>485.837.608,00</b> |           |
|                                   | <b>Hasil Evaluasi :</b>                                     |                       |                       |           |
|                                   | - Total Pendapatan ADD, PBH dan PAN                         |                       | <b>485.837.608,00</b> |           |
|                                   | - Total Belanja ADD, PBH dan PAN                            |                       | <b>484.477.313,39</b> |           |
|                                   | - Defisit   |                       | <b>(1.360.294,61)</b> |           |
|                                   | - Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, PBH dan DLL TA. 2021 |                       | <b>1.360.294,61</b>   |           |
|                                   | Sisa Anggaran   |                       | <b>0</b>              |           |
| <b>C</b>                          | <b>Pendapatan Dana Desa</b>                                 |                       | <b>915.652.000,00</b> |           |
| <b>D</b>                          | <b>Belanja Dana Desa</b>                                    |                       |                       |           |
|                                   | - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari                |                       | 19.652.000,00         |           |
|                                   | - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari                     |                       | 232.430.000,00        |           |
|                                   | - Bidang Pembinaan Masyarakat                               |                       | 41.101.663,00         |           |
|                                   | - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari                     |                       | 188.200.000,00        |           |
|                                   | - Bidang Tak Terduga  |                       | 440.700.000,00        |           |
|                                   | <b>JUMLAH</b>   |                       | <b>922.083.663,00</b> |           |
|                                   | - Defisit   |                       | <b>(6.093.663,00)</b> |           |
|                                   | - Defisit Dibiayai Dengan : Silpa Dana Desa (DD) TA. 2021   |                       | <b>6.093.663,00</b>   |           |
|                                   | Sisa Anggaran   |                       | <b>0</b>              |           |

